

Pengaruh E-Planning, E-Budgeting, dan E-Procurement Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Allysa Sekar Apriliani¹, Novi Dirgantari², Eko Hariyanto³, Hardiyanto Wibowo⁴
^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Purwokerto
allysasekar.apriliani@gmail.com, novidirgantari@ymail.com, ekoh0361@gmail.com,
hardiyantowb2d@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 9 Nopember 2022
Disetujui : 21 Nopember 2022
Dipublikasi : 1 Januari 2023

ABSTRACT

E-Government improves service excellent through making government data and services more available to most people and growing pace, convenience, and more efficient information. Implementation of e-Government, one of which is E-Planning, E-Budgeting, and E-Procurement. This study uses an empirical study on Electronic-Based Government System Data and SAKIP Scores in Regencies and Cities in Central Java in 2018-2020. The purpose of this observed was to determine the effect of E-Planning, E-Budgeting, and E-Procurement on the Government Performance Accountability System (SAKIP) in districts and cities in Central Java. The sampling approach used is saturated sample, in order to obtain 35 data. The research method used is quantitative. The data analysis technique used multiple linear regression analysis. The results showed that E-Planning, E-Budgeting had no effect on the government's performance accountability system (SAKIP) while E-Procurement had a positive effect on the government's performance accountability system (SAKIP).

Keywords: *e-planning, e-budgeting, e-procurement, and SAKIP*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas diyakini dapat memperbaiki kondisi pemerintahan untuk mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencapai sistem pemerintahan yang demokratis (Erryana dan Setyawan, 2016). Indonesia telah mengatur sistem pengukuran kinerja pemerintah pusat dan daerah sejak Inpres No. 7 dikeluarkan pada tahun 1999. Instruksi Presiden mensyaratkan dilaksanakan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. SAKIP ialah serangkaian kegiatan, alat, dan prosedur sistematis yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengumpulkan data serta mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan kinerja lembaga pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerjanya (Perpres Nomor 29 tahun 2014). Tercapainya tujuan untuk pertanggungjawaban public dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja untuk membantu pemerintah terbentuknya efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan public (Arjuna & Putri, 2019). Banyak pihak mengartikan akuntabilitas sebagai kewajiban yang membatasi pada pelaporan keuangan/anggaran saja. Keadaan ini menyebabkan instansi pemerintah melaporkan alokasi dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dapat memberikan dampak baik atau tidak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kinerja instansi tersebut (Rangkuti, 2018).

Praktik manajemen kinerja pemerintah daerah dihadapkan pada implementasi yang lambat (Wang, 2018). Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut adanya upaya untuk menerapkan e-government. *E-government* adalah salah satu cara untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Pelaksanaan *e-government* atau yang sekarang disebut dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *E-Government* merupakan teknologi informasi dan

komunikasi untuk menyediakan informasi dan layanan pemerintah yang lebih mudah diakses oleh masyarakat dan meningkatkan kelengkapan dan pemrosesan informasi yang lebih efisien (Crespo et al., 2017). Pada tahun 2020, hasil evaluasi SPBE Nasional dari skala 5 hanya mencapai nilai 2,26 yang disimpulkan masih mendapat kategori predikat cukup. *E-Planning*, *E-Budgeting*, dan *E-procurement* merupakan elemen *e-government*. Penerapan sistem *e-government* di Jawa Tengah sudah berjalan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun implementasi belum berjalan melalui sistem yang saling terkait atau tidak saling terintegrasi dan hanya kompilasi beberapa aplikasi menjadi satu ruang (Sofianto, 2019).

Tabel 1. Penerapan *E-Musrenbang* di Jawa Tengah

No	Kab/kota
	<i>E-Planning</i> (<i>E-Musrenbang</i>)
1	Kab. Banjarnegara
2	Kab. Demak
3	Kab. Jepara
4	Kab. Kudus
5	Kab. Pekalongan
6	Kab. Sragen
7	Kab. Tegal
8	Kab. Temanggung
9	Kab. Wonogiri
10	Kab. Wonosobo
11	Kota Semarang
12	Kota Surakarta
13	Kota Tegal

Tabel 2. Penerapan *E-Budgeting* di Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Keterangan
1	Kab. Pemasang	Belum Menerapkan <i>E-Budgeting</i>
2	Kota Salatiga	Belum Menerapkan <i>E-Budgeting</i>
3	Kab. Blora	Belum Menerapkan <i>E-Budgeting</i>
4	Kab. Grobogan	Belum Menerapkan <i>E-Budgeting</i>
5	Kab. Klaten	Belum Menerapkan <i>E-Budgeting</i>

Tabel 3. Penerapan *E-Procurement* di Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Keterangan
1	Kab. Banjarnegara	Tidak memuat <i>e-delivery</i>
2	Kab. Wonogiri	Memuat <i>e-payment</i>
3	Kota Surakarta	Memuat <i>e-simbada</i>
4	Kab. Banyumas	Memuat <i>e-simbada</i>
5	Kota Salatiga	Memuat <i>e-payment</i> , <i>e-simbada</i> dan <i>e-delivery</i>
6	Kab. Wonosobo	Memuat <i>e-payment</i> , <i>e-simbada</i> dan <i>e-delivery</i>
7	Kab. Batang	Memuat <i>e-payment</i> dan <i>e-delivery</i>
8	Kab. Jepara	Memuat <i>e-payment</i>
9	Kab. Purworejo	Memuat <i>e-payment</i>

10	Kab. Sragen	Memuat e-payment
11	Kab. Pekalongan	Tidak memuat e-delivery
12	Kab. Magelang	Memuat e-payment
13	Kab. Temanggung	Memuat e-simbada
14	Kab. Purbalingga	Memuat e-simbada
15	Kab. Kebumen	Memuat e-delivery
16	Kab. Rembang	Memuat e-payment
17	Kab. Sukoharjo	Memuat e-simbada

Hasil pemeringkatan *e-government* di Jawa Tengah, dari 35 kabupaten di Jawa Tengah hanya 10 kabupaten yang mendapatkan predikat baik, 1 diantaranya mendapat predikat sangat baik dan yang memperoleh predikat kurang dan sangat kurang dalam penerapan *e-government* di daerahnya terdapat 25 kabupaten.

E-planning adalah sistem perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya terdapat proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan berbagai usulan yang diantaranya terdapat usulan bantuan keuangan, masa reses kepada anggota DPRD, bantuan sosial, hibah, dan usulan kepada gubernur (Sofianto, 2019). Penganggaran secara elektronik (E-Budgeting) adalah sistem/aplikasi penganggaran berbasis web yang memfasilitasi proses penyusunan anggaran daerah (Rahman et al, 2018). Kelemahan dari penerapan sistem penganggaran adalah pada tahap perencanaan yang kurang detail. Kendala lainnya adalah sistem *e-budgeting* yaitu SDM yang tidak memadai kompetensi dalam mengimplementasikan sehingga cenderung mudah diretas yang dapat merusak data (Komala, 2020).

E-Procurement mempunyai manfaat dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas diantaranya dalam hal persaingan usaha yang baik, terciptanya proses untuk mengontrol audit serta informasi tentang kebutuhan dapat terpenuhi (Salim dkk., 2016). Teknologi ini dirancang untuk memusatkan interaksi antara organisasi, pelanggan, dan mitra lainnya untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi praktik pengadaan (Otundo & Richard, 2021). *E-Procurement* dapat mewujudkan aplikasi yang menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menciptakan terlaksananya kinerja yang efisien diantara internal dan eksternal instansi pemerintah (Nurlina et al., 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang sedang dikaji (Gamayuni et al., 2020) mengungkapkan penerapan *E-Planning* dan *E-Budgeting* terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pengungkapan *E-Planning* terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah seperti penelitian (Tandi et al., 2019) menunjukkan bahwa kualitas program *E-Planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara. (Gamayuni et al., 2020) menemukan bahwa Penerapan *E-Planning* dan *E-Budgeting* berpengaruh positif terhadap kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Beberapa penelitian sebelumnya masih beragam. Penelitian (LIU, 2020) penerapan *E-Budgeting* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Surabaya. Sementara hasil penelitian (Aprila & Melfariza, 2014) Perencanaan anggaran pada satuan kerja membuktikan tidak adanya pengaruh perencanaan terhadap akuntabilitas kinerja kota Bengkulu. Penelitian (Nurlina et al., 2018) *E-Procurement* adanya pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten/Kota se-Papua. Namun penelitian dari (Andari, 2020) membuktikan bahwa *E-Procurement* tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten/Kota serta Provinsi D.I. Yogyakarta.

STUDI LITERATUR

Stewardship Theory

Teori *Stewardship* mendefinisikan peran pemimpin yang tidak termotivasi oleh tujuan mereka sendiri, namun termotivasi oleh pencapaian tujuan utama organisasi (Donaldson dan Davis, 1991:49). Teori *stewardship* didasarkan pada sifat manusia yang jujur dan mempunyai integritas (Ikriati & Aprila, 2019). Dalam lembaga publik, akuntabilitas adalah tanggung jawab pemerintah sebagai *steward* untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik dengan

mengidentifikasi semua informasi keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi oleh organisasi (Jatmiko, 2020). Dalam teori stewardship, manajer menggunakan tujuannya sejalan dengan tujuan prinsipal, tetapi tidak berarti bahwa steward tidak mempunyai kebutuhan (Raharjo, 2007). Sesuai dengan pola penganggaran setelah masa reformasi keuangan yang menjadikan posisi pemerintah menjadi layanan masyarakat dalam penerapan *E-Planning*, *E-Budgeting*, *E-procurement*. Pemerintah sebagai agen/steward harus mempertanggungjawabkan/menyelesaikan kegiatan operasional dan menseleraskan tujuan pemerintah dengan masyarakat.

Public Governance Theory

Teori tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan dengan tuntutan pemerintah yang mempunyai prinsip pengelolaan akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, keadilan, partisipasi, dan kemandirian untuk tujuan kemajuan rakyat dan Negara (Sari, 2012). Tata kelola pemerintahan yang baik dimana dalam penerapan *E-Planning*, *E-Budgeting*, *E-Procurement* harus menerapkan nilai transparan dan akuntabel sesuai dengan undang undang negara yang penggunaan anggaran harus mengikuti aturan aturan perhitungan sesuai dengan undang undang tentang *e-government*.

Pengembangan Hipotesis

Pengungkapan E-Planning berpengaruh positif terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

E-Planning berpengaruh positif terhadap SAKIP daerah di Jawa Tengah. Dalam hal ini, pemerintah Jawa Tengah bertindak sebagai steward, sedangkan masyarakat bertindak sebagai prinsipal (masyarakat). Perencanaan Kinerja yang baik diharapkan akan menghasilkan akuntabilitas kinerja yang baik, di dalam e-planning diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah (Tandi et al., 2019). Hasil penelitian terdahulu, diantaranya menyatakan tentang keterkaitan pengaruh *E-Planning* terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Pada penelitian (Gamayuni & Hendrawaty, 2020) mempunyai hasil *E-Planning* berpengaruh positif terhadap SAKIP

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1 : Pengungkapan E-Planning berpengaruh positif terhadap SAKIP

Pengungkapan E-Budgeting berpengaruh positif terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

E-Budgeting berpengaruh positif terhadap SAKIP Daerah di Jawa Tengah. Sesuai dengan teori stewardship, steward harus dapat menyelaraskan tujuan, dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai adalah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk menilai sejauh mana pemanfaatan teknologi *E-budgeting* dalam menciptakan keterbukaan antar masyarakat dan pemerintah. Penerapan *E-budgeting* dapat meningkatkan penerapan teknologi informasi dengan memanfaatkan layanan pemerintah untuk mencapai efisiensi biaya dan waktu, efektivitas kinerja, transparansi dan akuntabilitas (Khoirunisak et al., 2017). Penelitian dari (Gamayuni & Hendrawaty, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *E-Budgeting* berpengaruh positif terhadap SAKIP Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: E-Budgeting berpengaruh positif terhadap SAKIP

Pengungkapan E- Procurement berpengaruh positif terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Penerapan *E-procurement* merupakan upaya dalam peningkatan akuntabilitas pemerintahan. sesuai dengan penelitian (Andari 2020) dengan teori tata kelola pemerintah dapat mewujudkan kelola pemerintahan yang baik. Penelitian Nurlina dkk. (2018) menjelaskan *E-Procurement* memiliki pengaruh signifikan terhadap SAKIP.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: E-Procurement berpengaruh positif terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Guna mengukur tingkat penerapan E-Planning, E-Budgeting dan E-

Procurement digunakan metode content analysis, yaitu suatu teknik untuk mengalisis dan memahami teks kemudian menggolongkan sesuai indicator penelitian yang telah ditetapkan (Shi et al., 1998). Populasi yang digunakan adalah seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Sampel yang digunakan adalah 29 kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang telah menerapkan e-government berupa E-Planning, E-Budgeting Dan E-Procurement. Pemilihan objek penelitian diperoleh dari kriteria yang telah ditentukan yaitu data dan informasi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Skor SAKIP yang terdapat di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2020.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah SAKIP (Y). Variabel Independen dalam penelitian ini E-Planning (X1), E-Budgeting (X2) Dan E-Procurement (X3). Penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan persamaan: $Skor\ SAKIP = \alpha + \beta_1EP + \beta_2EB + \beta_3EPR + e$.

Tabel 4. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	
Implementasi E-Planning	Tingkat Implementasi E-Planning	
		Skor
	Belum Menerapkan <i>E- Planning</i>	0
	Sudah Menerapkan <i>E- Planning</i>	1
	E- Musrenbang (Usulan Non Fisik/Fisik Berupa barang)	1
	E-Musrenbang (Plafon Anggaran)	1
	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	1
	Rencana Penyerapan	1
	Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	1
	E- city Planning (Daftar Usulan Proyek)	1
E- city Planning (Alokasi& lokasi proyek)	1	
Implementasi E-Budgeting	Tingkat Implementasi E-Budgeting	
		Skor
	Belum menerapkan <i>e- budgeting</i>	0
	Sudah menerapkan <i>e- budgeting</i>	1
	Terdapat peraturan walikota/peraturan bupati/Perda	1
	Harga satuan barang/jasa	1
	Harga total Barang/Jasa	1
	Batas atas(deviasi batas atas dalam bentuk persen)	1
Harga setelah pajak Barang/Jasa	1	
Kelompok belanja Barang/Jasa	1	
Implementasi E-Procurement	Tingkat Implementasi E- Procurement	
		Skor
	Belum Menerapkan <i>E- Procurement</i>	0
	Sudah Menerapkan <i>E- Procurement</i>	1
	Menerapkan LPSE	1
	Menerapkan <i>e-project</i>	1
	Menyediakan Informasi mengenai paket lelang yang ditawarkan	1
	Menyediakan Informasi mengenai nama paket	1
	Menyediakan informasi mengenai ada atau tidaknya pemenang lelang	1
	Terdapat Personil	1
	Terdapat partisipasi kegiatan	1
	Terdapat Peserta Partisipasi Kegiatan	1
Terdapat Standarisasi Lelang	1	
Terdapat E- Delivery	1	
Terdapat E- Payment	1	

	Terdapat E- Simbada	1	
	Terintegrasi dengan SAKIP dan e-SAKIP	1	
	Sumber : GRMS SURABAYA		
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Kategori skor dan evaluasi Integrasi implementasi SAKIP		
	Kategori	Skor	Interprestasi
	AA	>90-100	Sangat Puas
	A	>80-90	Puas, mendorong perubahan, kinerja manajemen sistem yang sangat baik, akuntabel
	BB	>70-80	Unggul, akuntabilitas kinerja cukup baik, memiliki sistem manajemen kinerja, dan membutuhkan beberapa perbaikan..
	B	>60-70	Baik, akuntabilitas baik, adanya sistem manajemen kinerja yang perlu ditingkatkan.
	CC	>50-60	Cukup, Akuntabilitas kinerja sesuai, konsisten dengan kebijakan, sistem untuk membuat informasi kinerja tersedia untuk akuntabilitas,memerlukan perbaikan non-fundamental.
	C	>30-50	Tidak puas, sistem kurang diandalkan, adanya manajemen sistem kinerja tetapi perlu beberapa perbaikan besar.
	D	0-30	Sangat Tidak Puas, sistem dan langkah-langkah untuk menerapkan manajemen kinerja tidak dapat diandalkan, banyak perbaikan yang diperlukan
	Sumber : Permen PANRB No 12 Tahun 2015		

HASIL

Table 5. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
E-PLANNING	105	.00	8.00	3.1048	2.37343	
E-BUDGETING	105	.00	8.00	3.4952	2.51963	
E-PROCUREMENT	105	7.00	15.00	10.5619	2.12097	
SAKIP	105	55.61	74.96	64.1215	4.29172	
Valid N (listwise)	105					

Source : OUTPUT SPSS 2022

Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 105 sampel. Dilihat pada tabel diatas nilai minimum (batas bawah) pada variabel *e-planning* sebesar 0,00 dan nilai maksimum (batas atas) yaitu 8,00. Nilai mean yang dimiliki sebesar 3,1048, nilai deviasi standar sebesar 2,37343. Untuk penerapan *e-planning* pada daerah di jawa tengah terendah yaitu terdapat di kota Salatiga, kabupaten Kebumen, dan kabupaten Grobogan yang artinya daerah tersebut pada tahun 2018 sampai dengan 2020 belum menerapkan *e-planning*. Sementara itu, untuk daerah di jawa tengah

dalam penerapan *e-planning* tertinggi terdapat pada kabupaten Sragen yang artinya di tahun 2018 sampai dengan 2020 sudah diterapkannya *e-planning* dengan penerapan indikator yang memenuhi masing masing sub item *e-planning*.

Sedangkan pada variabel *e-budgeting* nilai minimum yang dimiliki sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 8,00. Nilai mean yang ada sebesar 3,4952, dengan deviasi standar sebesar 2,51963. Untuk penerapan *e-budgeting* pada daerah di Jawa Tengah terendah yaitu terdapat di kabupaten Pemalang, kota Salatiga, kabupaten Blora, kabupaten Grobogan dan kabupaten Klaten. Artinya daerah tersebut pada tahun 2018 sampai dengan 2020 belum menerapkan *e-budgeting*. Sementara itu, untuk daerah di Jawa Tengah dalam penerapan *e-budgeting* tertinggi terdapat pada kabupaten Batang yang artinya penerapan tingkat implementasi *e-budgeting* memenuhi semua indikator yang ada.

Variabel *e-procurement* memiliki nilai minimum sebesar 7,00 dan nilai batas atas yakni 15,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 10,5619, sedangkan deviasi standar yaitu 2,1097. Untuk *e-procurement* pada daerah di Jawa Tengah terendah yaitu terdapat di kabupaten Demak yang artinya daerah tersebut pada tahun 2018 sampai dengan 2020 dalam tingkat implementasi *e-procurement* belum memenuhi semua indikator diantaranya tidak terdapat personil, partisipasi kegiatan dan pesertanya serta keterangan standarisasi lelang. Kemudian tidak adanya *e-delivery*, *e-payment* dan *e-simbada*. Sementara itu, untuk daerah di Jawa Tengah dalam penerapan *e-procurement* tertinggi terdapat pada kabupaten Wonosobo yang artinya penerapan tingkat implementasi *e-procurement* memenuhi indikator.

Variabel SAKIP memiliki nilai minimum sebesar 55,61 dan nilai batas atas yakni 74,96. Nilai rata-rata (mean) sebesar 64,1215, sedangkan deviasi standar yaitu 4,29172. Untuk Skor SAKIP terendah didapatkan pada kabupaten Jepara pada tahun 2020 yang artinya dengan skor tersebut masuk kedalam kategori CC dengan interpretasi Cukup, akuntabilitas kinerja sesuai, konsisten dengan kebijakan, sistem untuk membuat informasi kinerja tersedia untuk akuntabilitas, dan memerlukan perbaikan non-fundamental. Sementara itu untuk Skor SAKIP tertinggi terdapat pada kabupaten Banyumas yang artinya masuk dalam kategori BB dengan interpretasi Unggul, akuntabilitas kinerja cukup baik, memiliki sistem manajemen kinerja, dan membutuhkan beberapa perbaikan.

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	58.319	2.119			.000
E-PLANNING	.271	.185	.150		.146
E-BUDGETING	.173	.173	.102		.319
E-PROCUREMENT	.412	.193	.204		.035

Source : OUTPUT SPSS 2022

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$SAKIP = 58.319 + 0,271EP + 0,173EB + 0,412 EPR + e$$

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

α = Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar 58,319, dimana hasil tersebut menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-procurement* bernilai 0 maka nilai pengungkapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah sebesar 58.319

β_1 = koefisien *e-planning* sebesar 0,271 menunjukkan setiap kenaikan *e-planning* sebesar 1 satuan akan diikuti kenaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebesar 0,271

β_2 = koefisien *e-budgeting* sebesar 0,173 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel *e-budgeting* sebesar 1 satuan maka akan menghasilkan kenaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebesar 0,173

β_3 = koefisien *e-procurement* sebesar 0,412 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan *e-procurement* akan menaikkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebesar 0,412

e = Kesalahan pengukuran pada variabel bebas untuk menjelaskan atau mengukur variabel terikat.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji tentang analisis pengaruh variabel yang mempengaruhi SAKIP. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaruh E-Planning (X1) terhadap SAKIP (Y)

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variable *E-Planning* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah (SAKIP). Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel hasil uji t, nilai signifikansinya sebesar $0,146 > 0,05$, dengan nilai t-hitung *e-planning* lebih kecil daripada t table ($1.464 < 1.65950$), Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *e-planning* berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah ditolak. Berdasarkan data tahun 2018 sampai dengan 2020 hal ini dapat ditunjukkan dengan bukti pada kabupaten Purbalingga, Pekalongan, Cilacap, Batang, Purworejo dimana *E-Planning* mengalami kenaikan skor nilai dan skor SAKIP. Hal ini berarti besar kecilnya nilai *E-Planning* pada setiap kabupaten tidak berpengaruh terhadap SAKIP

Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori *stewardship*, di mana pemerintah Jawa Tengah bertindak sebagai *Steward*, tetapi masyarakat bertindak sebagai *principal* yang berdasarkan asumsi filosofis tentang sifat manusia bahwa pemerintah atau sifat manusia dapat dipercaya dan menjadi individu yang bertanggung jawab dan berintegritas dapat yang diwujudkan dengan penerapan *e-planning* untuk menciptakan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan yang lebih baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Nurlaila et al., 2021) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian berupa variabel *e-planning* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pengaruh E-Budgeting(X2) terhadap SAKIP (Y)

Variable *E-Budgeting* tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah (SAKIP). Pada tabel hasil uji t, nilai signifikansinya sebesar $0,319 > 0,05$ dengan nilai t-hitung *E-Budgeting* lebih kecil daripada t table ($1.002 < 1.65950$). Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *E-Budgeting* berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah ditolak. Berdasarkan data tahun 2018 sampai dengan 2020 hal ini dapat ditunjukkan dengan bukti pada kabupaten Cilacap, Wonosobo, Karanganyar, Purworejo, Purbalingga, Semarang dan Tegal dimana *E-Budgeting* mengalami kenaikan skor nilai dan skor SAKIP mengalami kenaikan pula. Hal ini berarti besar kecilnya nilai *E-budgeting* pada setiap kabupaten tidak berpengaruh terhadap SAKIP

Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori *stewardship*, di mana pemerintah mempunyai tujuan yang harus bertanggung jawab untuk mengevaluasi penggunaan *e-budgeting* dalam menciptakan keterbukaan di kalangan publik. Untuk menentukan tujuan kinerja yang baik, pemerintah mengintegrasikan *e-budgeting* untuk menciptakan proses akuntabilitas kinerja yang baik. hasil penelitian ini mendukung penelitian (Aprila & Melfariza, 2014) yang variabel *E-Budgeting* tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah

Pengaruh E-Procurement (X3) terhadap SAKIP (Y)

Untuk Hasil uji hipotesis variable *E-Procurement* mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah (SAKIP). Dengan melihat tabel hasil uji t, nilai signifikansinya $0.035 < 0,05$. Untuk nilai t-hitung *E-Procurement* lebih besar daripada t table ($2,135 > 1,65950$). Hipotesis ketiga mengungkapkan bahwa *E-Procurement*

berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja institusi pemerintah daerah di Jawa Tengah diterima.

Hasil penelitian sesuai teori tata kelola pemerintahan, dimana *E-procurement* dapat berkontribusi pada pelaksanaan akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan yang baik dengan mematuhi aturan seperti keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nurlina et al. (2018) Dalam studi empiris pendekatan e-procurement, variabel berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

KESIMPULAN

Variabel *E-Planning* dan *E-Budgeting* tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Jawa Tengah. namun sebaliknya, untuk variabel *E-Procurement*, memberi bukti empiris pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah. Praktik *E-Planning* dan *E-Budgeting E-Procurement* di Jawa Tengah masih sangat rendah, sehingga SAKIP tidak bisa terpengaruh. Terkait temuan hasil riset ini, dari berbagai sudut pandang baik secara grand theory agar dapat menjadi rekomendasi perbaikan bagi pengambilan kebijakan publik atau untuk pengembangan teoritik, yaitu untuk lebih menekankan riset ke depan pada faktor yang bisa mendorong daerah untuk punya political will dalam menerapkan *e-government* secara maksimal. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu *E-Planning*, *E-Budgeting*, *E-Procurement*, kurangnya sebaran data 2021 karena keterbatasan data Skor SAKIP di tahun 2021 dan tidak lengkapnya informasi data *E-government* (*E-Planning*, *E-Budgeting*, *E-Procurement*) pada GRMS masing masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

REFERENSI

- Ada, Y., Kalangi, L., & Warongan, J. D. L. (2020). Analisis Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pelaksanaan E-Procurement Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 11(1), 97–112.
- Agustina, D. P. (2021). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Implementasi E-Government di Bali. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 424. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.42044>
- Andari, M. W. (2020). Pengaruh Sistem Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pencegahan Fraud. 161.
- Aprila, N., & Melfariza. (2014). *Jurnal Fairness*. Fairness, 4.
- Arjuna, & Putri, A. M. (2019). *Jurnal Akuntansi*. *Jurnal Akuntansi*, 51(1), 1–15.
- Basheka, B.C. (2008), "Procurement planning and accountability of local government procurement systems in developing countries: evidence from uganda", *Journal of Public Procurement*, Vol. 8 No. 3, pp. 379-406. <https://doi.org/10.1108/JOPP-08-03-2008-B005>
- Carmeli A, A. F. A. (2004). PROCUREMENT PLANNING AND ACCOUNTABILITY OF LOCAL GOVERNMENT PROCUREMENT SYSTEMS IN DEVELOPING COUNTRIES: EVIDENCE FROM UGANDA. *The Eletronic Library*, 34(1), 1–5.
- Desmond, A., Osei Tutu, E., Kissi, E., & Tutu, S. O. (2019). Evaluating critical factors for the implementation of e-procurement in Ghana. *International Journal of Procurement Management*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.1504/ijpm.2019.10018011>
- Fanida, Eva Hany & (Niswah, F. (2015). G. R. M. S. (GRMS); I. L. P. dalam P. K. D. P. K. S. (2015). Fanida, Eva Hany & (Niswah, Fitrotun. (2015). Government Resource Management System (GRMS); Inovasi Layanan Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. 1–8. <https://www.semanticscholar.org/paper/Government->

Resource-Management-System-(GRMS)%3A-Dalam-Fanida-Niswah/bb4224a752e595defc712b9d20d591bc8f225a87

- Febrianti, T., & Indrawati Yuhertiana. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 137–146. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i1.381>
- Gamayuni, R. R., Hendrawaty, E., Ekonomi, F., & Lampung, U. (2020). E-Planning , E-Budgeting dan Kualitas Instansi Pemerintah Sistem Akuntabilitas Kinerja di Indonesia. 12(1), 218–225.
- Harahap, D. R., Badaruddin, B., & Harahap, R. H. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. *Perspektif*, 10(1), 76–87. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4073>
- doni003. 2021. Indeks SPBE 2020 Meningkatkan, Pemerintah Tidak Berpuas Diri. Diunduh di <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32478/indeks-spbe-2020-meningkat-pemerintah-tidak-berpuas-diri/0/berita> tanggal 1 Februari 2021
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Komala, A. R. (2020). E-Budgeting to Enhance the Quality of Information. *Proceedings of the International Conference on Business, Economic, Social Science, and Humanities – Economics, Business and Management Track (ICOBEST-EBM 2019)*, 112, 190–194. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200108.044>
- LIU. (2020). PENGARUH IMPLEMENTASI E-BUDGETING TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA. 151–156.
- Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15671>
- Nandankar, S. and Sachan, A. (2020), "Electronic procurement adoption, usage and performance: a literature review", *Journal of Science and Technology Policy Management*, Vol. 11 No. 4, pp. 515-535. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-02-2020-0031>
- Nasution, A. P., & Atika. (2019). Implementasi E-Budgeting sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1–13. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/454>
- Nurdin, N., Scheepers, H. and Stockdale, R. (2022), "A social system for sustainable local e-government", *Journal of Systems and Information Technology*, Vol. 24 No. 1, pp. 1-31. <https://doi.org/10.1108/JSIT-10-2019-0214>
- Nurlaila, A., Tiyas, I. ;, & Haryani, N. (2021). E – Government di Kota Surakarta dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 1(1), 176–189. <https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/53143>

Nurlina, D., Falah, S., & Asnawi, M. (2018). The Effect of Procurement System and Internal Control System on Accountability of Instant Performance in Preventing Fraud. *International Journal of Management (IJM)*, 9(4), 29–39.

Nkundabanyanga, S.K., Jayasinghe, K., Abaho, E. and Mugambe, K. (2022), "Contingency factors and budget actors' behaviour during COVID-19: the case of Uganda", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2021-0058>

Otundo, M., & Richard, M. O. (2021). *Pr ep rin t n er r Pr ep rin er ed*.

Raharjo, E. (2015). The Accounting Perspective. *Enterprise Risk Management*, 31–41. https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003

Sari, D. 2012. "Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi & Bisnis*, 718–27. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/1914>.

Santosa, M. H., Maarif, S., Eriyatno, E., & Andati, T. (2016). Strategi Sistem Audit Internal Pemerintah Dalam Rangka Tata Kelola Yang Baik. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(2), 263–273. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v20i2.359>

Saputra, O. A. (2021). IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC BUDGET POLICY IN THE ARRANGEMENT OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE. 20(2), 1284–1290. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.02.147>

Shi, Y. L., Liu, J., David, V. J., Zhuang, J. C., & Ma, L. (1998). Application of mechanical and statistical models to the study of seismicity of synthetic earthquakes and the prediction of natural ones. In *Acta Seismologica Sinica English Edition* (Vol. 11, Issue 4). <https://doi.org/10.1007/s11589-998-0087-6>

Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah. *Matra Pembaruan*, 3(2), 99–108. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.99-108>

Tandi, E. H., Nurkholis, N., & Subekti, I. (2019). The Impact of E-Planning Program Quality, Implementation of Internal Control System and Leadership Style on the Performance of State Civil Apparatur. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(2), 77. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i2.599>